

ABSTRAK

RIVA ARIANTI, NPM: **2022380**, Judul Skripsi "**Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara**" dibawah bimbingan Bapak **Muhamad Arsyad, S.Pd.I., M.AP** selaku pembimbing I dan Ibu **Ratna Sari, S.Sos., MA** selaku pembimbing II.

Tipiring merupakan pelanggaran hukum dengan ancaman pidana penjara atau kurungan maksimal tiga bulan dan/atau denda. Dalam pelaksanaannya ditemukan fenomena minimnya sosialisasi, jangkauan penanganan yang masih terfokus di Amuntai Tengah, dan kecenderungan penyelesaian secara damai, yang dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi penanganan Tipiring pada Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara serta faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, dianalisis secara kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 13 informan yang dipilih secara purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penanganan Tipiring sudah cukup optimal. Indikator transmisi cukup optimal karena informasi tersalur melalui kegiatan rutin seperti patroli dialogis dan layanan darurat 110, meskipun belum terprogram khusus. Indikator kejelasan cukup optimal karena pemahaman prosedural secara internal sudah berjalan baik. Indikator konsistensi cukup optimal karena arahan dan perintah dilaksanakan secara berkelanjutan. Indikator staf cukup optimal dari sisi kompetensi personel, meskipun rasio terhadap luas wilayah masih terbatas. Indikator fasilitas cukup optimal karena sarana, armada, dan anggaran yang tersedia sudah memadai. Indikator sesuai perintah sudah optimal karena pelaksanaan tugas mengacu pada ketentuan yang berlaku. Indikator wewenang cukup optimal karena kewenangan penanganan masih terbatas pada tingkat Polres. Indikator sikap pelaksana cukup optimal karena anggota melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Indikator insentif kurang optimal karena tidak tersedia insentif finansial personal bagi anggota. Indikator pengaturan birokrasi sudah optimal karena pembagian tugas dan koordinasi telah berjalan sesuai struktur organisasi. Indikator SOP cukup optimal karena prosedur formal sudah ada dan dipahami anggota. Indikator fragmentasi cukup optimal karena pembagian tugas internal sudah berjalan baik, meskipun jabatan Kanit Tipiring masih dirangkap. Faktor pendukung meliputi loyalitas personel dan koordinasi yang baik dengan Pengadilan Negeri Amuntai. Faktor penghambat meliputi belum adanya personel bersertifikasi Tipiring, rendahnya pemahaman masyarakat, dan jangkauan penanganan yang masih terpusat di Amuntai Tengah.

Disarankan agar Unit Samapta Bhayangkara Polda Resor Hulu Sungai Utara meningkatkan sosialisasi Tipiring secara terprogram, mengupayakan pemerataan personel dan sarana di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta memperkuat penerapan SOP dan pembagian tugas, agar penanganan Tipiring dapat berjalan lebih optimal.

ABSTRACT

RIVA ARIANTI, NPM: 2022380, Thesis Title **"Implementation of Handling of Petty Crimes (Tipiring) in the Samapta Bhayangkara Unit of the North Hulu Sungai Resort Police"** under the guidance of Mr. **Muhamad Arsyad, S.Pd.I., M.AP** as supervisor I and Mrs. **Ratna Sari, S.Sos., MA** as supervisor II.

Tipiring is a violation of the law punishable by imprisonment or detention of up to three months and/or a fine. Its implementation reveals limited socialization, handling that remains focused on Central Amuntai, and a tendency toward amicable settlement, influenced by factors of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study aims to determine the implementation of Tipiring handling in the Samapta Bhayangkara Unit of the North Hulu Sungai Resort Police and the factors affecting it.

This study uses George C. Edward III's policy implementation theory, comprising four variables: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure, analyzed qualitatively through observation, interviews, and documentation involving 13 purposively selected informants.

The results show that the implementation of Tipiring handling is quite optimal. The transmission indicator is quite optimal because information reaches the community through routine activities such as dialogical patrols and the 110 emergency service, although not yet through a dedicated program. The clarity indicator is quite optimal because internal procedural understanding runs well. The consistency indicator is quite optimal because directions and orders are implemented on an ongoing basis. The staff indicator is quite optimal in terms of personnel competence, although the ratio to the area covered remains limited. The facility indicator is quite optimal because the available facilities, fleet, and budget are adequate. The compliance-with-orders indicator is optimal because task implementation follows applicable provisions. The authority indicator is quite optimal because handling authority is still limited to the Police level. The attitude of implementers indicator is quite optimal because members carry out their duties responsibly. The incentive indicator is less than optimal because no personal financial incentive is available for members. The bureaucratic regulation indicator is optimal because division of tasks and coordination run according to the organizational structure. The SOP indicator is quite optimal because formal procedures exist and are understood by members. The fragmentation indicator is quite optimal because internal division of tasks runs well, although the position of the Tipiring Office is still held concurrently. Supporting factors include personnel loyalty and good coordination with the Amuntai District Court. Inhibiting factors include the absence of Tipiring certified personnel, low public understanding, and handling that remains centralized in Central Amuntai.

It is suggested that the Samapta Bhayangkara Unit of the North Hulu Sungai Resort Police increase the socialization of Tipiring programmatically, strive for an equitable distribution of personnel and facilities throughout North Hulu Sungai Regency, and strengthen the implementation of SOPs and division of tasks, so that the handling of Tipiring can run more optimally.